

APPLICATION OF PERSONNEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIMPEG) IN THE PROCESS OF MUTATION / TRANSFER OF STATE CIVIL APPARATUS AT BKPSDMD MAKASSAR CITY

Haedar Akib¹, Muhammad Arifin², Ismail³, Asri Nur Aina^{4*}
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosil dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
Email: asrinuraina@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the Application of the Personnel Management Information System (SIMPEG) in the process of mutation / transfer of state civil apparatus in BKPSDMD Makassar City. This research includes descriptive Qualitative Research with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques consist of data reduction, data translation and conclusions.

The results showed that the application of the Personnel Management Information System (SIMPEG) in the mutation / transfer of the state civil apparatus in the BKPSDMD Makassar City. With the presence of the Personnel Management Information System (SIMPEG) at the Regional Human Resources and Management Personnel Agency (BKPSDMD) Makassar City provides good benefits to all BKPSDMD employees who use SIMPEG. By changing the Manual Pattern to an all-Digital one. This will help reduce the risk of errors and speed up the overall ASN mutation process. When viewed from several dimensions of Rivai Personnel Information System Criteria (2009), namely Timely, Accurate, Relevant, and Complete. However, it needs to be optimized on the Just-in-Time Dimension because with the problem of the network / server can inhibit the ASN mutation process. For this reason, BKPSDMD prioritizes having a reliable network infrastructure so that the Mutation / Transfer of State Civil Apparatus in BKPSDMD Makassar City runs smoothly.

Keywords : Application, Personnel Management Information System

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi, dibutuhkan tenaga kerja ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai alat kelengkapan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam rangka melaksanakan tujuan negara dan memahami tujuan bernegara sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. dalam sistem manajemen informasi kepegawaian diperlukan untuk memudahkan Melaksanakan pekerjaan PNS. Informasi adalah data yang diproses bentuk yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi penerima dalam membuat keputusan di sekarang dan masa depan. di samping itu, informasi memiliki karakteristik nyata atau salah, baru, tambahan dan dikoreksi (Ladjamudin, 2005, hal. 8). informasi yang diperoleh Melalui proses pengolahan

data, kini telah bisa berlari cepat, dimana akhirnya bisa menghasilkan beberapa informasi Akurat dan sesuai kebutuhan penggunanya.

Sistem informasi manajemen kepegawaian menjadi solusi bagi instansi pemerintah dalam hal penanganan data dan informasi kepegawaian. Dalam penyelenggaraannya pemerintah membuat peraturan tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri pasal 1 (ayat 1) bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG-KDN adalah rangkaian informasi dan data pegawai yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang berfungsi menjalankan proses bisnis dan menghasilkan informasi yang berguna dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2017 merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara dimana dalam pasal 127 ayat (1) mengatakan yakni untuk menjamin efisiensi,efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses,dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya.

Perkembangan teknologi informasi saat ini mengharuskan setiap instansi mengembangkan sistem informasi yang fungsinya ditentukan oleh sistem informasi. Perlunya instansi pemerintah untuk mengelola data kepegawaian secara tepat waktu, akurat, dan akuntabel dengan menerapkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang baik, khususnya dengan mengganti sistem pengelolaan data yang dimana sebelumnya masih menggunakan cara manual dan disimpan dalam database. Sebuah sistem informasi manajemen kepegawaian akan memecahkan masalah data-data kepegawaian.

Perpindahan atau mutasi merupakan suatu kegiatan rutin dalam suatu organisasi untuk dapat melaksanakan prinsip “*the right man and the right place*” atau “orang yang tepat dan tempat yang tepat”. Sebenarnya, cara gagasan itu ditafsirkan tidak hanya dipandang sebagai menempatkan seorang pegawai sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya, tetapi juga harus dipandang sebagai seorang pemimpin yang menempatkan kepemilikan atas pengetahuan yang dimilikinya sesuai dengan kepemilikan atas keputusan yang diambil. Hasilnya, organisasi dapat melakukan mutasi dengan lebih berhasil dan efisien. (Fahmi 2011:4).

Peluang pengelolaan data dan informasi yang tepat dan akurat saat ini dihadirkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Perkembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dilatar belakangi oleh kemungkinan perbaikan proses kerja sebagai hasil dari pemanfaatan teknologi informasi yang tepat di kepegawaian dengan pengelolaan data. Selain itu, instansi terkait harus

sadar dan mampu mengimplementasikan kemajuan teknologi dengan memperkuat infrastruktur kelembagaannya.

Sejauh ini penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) kota Makassar masih mengalami suatu permasalahan seperti SIMPEG terkadang terhalang masalah jaringan/server sehingga operator tidak dapat mengakses data kepegawaian yang diperlukan pada saat itu, sehingga mempengaruhi keterlambatan dan pemrosesan dokumen. Jadi proses mutasi/perpindahan membutuhkan pemrosesan dokumen-dokumen terkait, seperti surat permohonan mutasi, persetujuan atasan, dan dokumen pendukung lainnya. Jika SIMPEG mengalami kendala teknis atau kegagalan sistem, hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan dokumen-dokumen tersebut dan berdampak pada waktu penyelesaian proses mutasi/perpindahan Aparatur Sipil Negara. Dengan adanya masalah tersebut maka pelaksanaan SIMPEG belum berjalan secara efektif sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu diperlukan peningkatan dan pematapan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) kota Makassar.

Menurut Laudon & Laudon (2018), sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang berfungsi mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data dan bertujuan untuk memberi informasi, pengetahuan, dan produk digital. saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda dengan yang lain, tetapi tetap dapat bekerja sama, untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebuah sistem informasi kepegawaian haruslah dirancang untuk menyediakan informasi tentang pegawai. Informasi yang dikehendaki pada umumnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Rivai, 2009):

- a. Tepat Waktu. pimpinan atau departemen kepegawaian haruslah memiliki akses untuk memutakhirkan informasi. Jika selama ini masih menggunakan sarana informasi yang relatif sederhana, maka tugas manajer harus mengejar sarana informasi yang mutakhir.
- b. Akurat. Pimpinan atau departemen kepegawaian harus mampu bergantung pada akurasi informasi yang disediakan. Segala bentuk informasi yang tidak akurat, perkiraan, dugaan, taksiran akan berdampak buruk juga bagi sebuah organisasi.
- c. Relevan. pimpinan atau departemen kepegawaian harus mendapatkan informasi, tidak hanya informasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Sementara bentuk informasi lain yang belum dapat difungsikan dapat atau cukup diketahui secara terbatas.
- d. Lengkap. pimpinan atau departemen kepegawaian harus mampu mendapatkan informasi secara lengkap, tidak sepotong-potong.

Pemerintah dalam menerapkan sistem informasi manajemen membuat

regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 1 ayat 6 Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga penulis bisa mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami bagaimana Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawain (SIMPEG) Terhadap Proses Mutasi/Perpindahan ASN Lingkup Pemerintah Pada BKPSDMD Kota Makassar.

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan penulis berlokasi pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Daerah Kota Makassar yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 2, Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan adalah salah satu unsur penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Daerah Kota Makassar merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola data administrasi kepegawaian serta memberikan pelayanan informasi yang akurat dan efisien kepada pegawai di lingkup pemerintah Kota Makassar.

Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengukur tercapainya Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIMPEG) Dalam Proses Mutasi/Perpindahan Aparatur Sipil Negara Di BKPSDMD Kota Makassar, Peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Rivai (2009) yang terdiri dari: *Tepat Waktu, Relevan, Akurat, dan lengkap*. Setelah melakukan penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa hasil Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dalam Proses Mutasi Aparatur Sipil Negara Di BKPSDMD Kota Makassar dengan mengacu pada empat dimensi dapat dilihat melalui uraian sebagai berikut:

1. *Tepat Waktu*

Teori Tepat Waktu dimaksud oleh Rivai (2009) menjelaskan Tepat waktu adalah keadaan atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau diharapkan. Hal ini berarti menjalankan suatu aktivitas atau menyelesaikan suatu tugas dalam batas waktu yang telah ditentukan, tanpa ada keterlambatan.

Dimensi *Tepat Waktu* dapat disimpulkan bahwa masih ada masalah mengenai permasalahan Gangguan pada SIMPEG, Terjadinya Overload Jaringan jumlah pengguna SIMPEG dan Terjadinya Kegagalan Server sehingga server

yang digunakan untuk menyimpan data kepegawaian atau menjalankan aplikasi SIMPEG mengalami kegagalan. Sehingga Pegawai ASN yang ingin mutasi menunggu sampai jaringan terhadap SIMPEG sudah membaik.

2. Akurat

Teori Akurat yang dimaksud oleh Rivai (2009) menjelaskan bahwa istilah yang mengacu pada kebenaran, kecermatan, dan ketepatan, informasi atau tindakan yang dilakukan. Dalam berbagai konteks, akuratis menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap fakta, ketepatan pengukuran atau perhitungan, atau kesesuaian dengan standar atau harapan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan dilingkup BKPSDMD Kota Makassar dapat dikatakan bahwa berdasarkan keseluruhan pernyataan informan tersebut yang kemudian dengan Dimensi *Akurat* maka dapat disimpulkan bahwa SIMPEG yang mengedepankan akurasi data dan informasi kepegawaian, organisasi dapat menghindari kesalahan atau ketidakakuratan yang dapat berdampak negatif pada SIMPEG tersebut.

3. Relevan

Teori *Relevan* yang dimaksud oleh Rivai (2009) menjelaskan bahwa sesuatu yang memiliki hubungan atau kaitan yang penting dengan topik atau konteks yang sedang dibicarakan. Ketika sesuatu dikatakan relevan, itu berarti memiliki relevansi yang signifikan terhadap situasi atau masalah yang sedang dibahas.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan dilingkup BKPSDMD Kota Makassar dapat dikatakan bahwa berdasarkan keseluruhan pernyataan informan tersebut yang kemudian dengan Dimensi *Relevan* maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan SIMPEG organisasi dapat memastikan relevansi data pegawai dalam proses mutasi ASN. Dengan mempertimbangkan kriteria seleksi yang relevan, mengintegrasikan informasi relevan, dan memfasilitasi pembaruan Data yang diperlukan, SIMPEG membantu menentukan pegawai yang paling sesuai untuk mutasi ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4. Lengkap

Teori *Lengkap* yang dimaksud oleh Rivai (2009) menjelaskan bahwa Sesuatu yang mencakup semua bagian, aspek, atau elemen yang diperlukan atau diharapkan atau memenuhi suatu keadaan atau standar tertentu. Ketika sesuatu dikatakan lengkap, itu berarti tidak ada yang kurang atau tidak ada yang terlewat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan dilingkup BKPSDMD Kota Makassar dapat dipahami bahwa berdasarkan keseluruhan pernyataan informan tersebut yang kemudian dengan indikator *Lengkap* maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) juga dapat berperan penting dalam menjaga kelengkapan dalam proses mutasi ASN. SIMPEG dapat membantu dalam mengelola data kualifikasi, evaluasi kinerja, riwayat mutasi, dan

pemetaan keterampilan pegawai. Dengan memanfaatkan SIMPEG dengan baik, informasi yang akurat dan terkini dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan mutasi yang tepat. Secara keseluruhan, kelengkapan dalam proses mutasi ASN merupakan faktor penting untuk memastikan proses mutasi yang adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dengan memenuhi semua persyaratan dan menjaga transparansi serta keadilan, organisasi dapat mencapai hasil mutasi yang terbaik untuk kepentingan semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dalam Proses Mutasi/Perpindahan Aparatur Sipil Negara di BKPSDMD Kota Makassar masih belum dikatakan efektif hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang menunjukkan bahwa masih terdapat suatu masalah pada SIMPEG tersebut, dimana BKPSDMD masih sering terjadi gangguan jaringan/server dan penggunaan SIMPEG yang diakses secara bersamaan sehingga pelayanan tersebut ASN yang ingin mutasi menunggu sampai jaringan/server terhadap SIMPEG membaik. SIMPEG yang mengedepankan akurasi data dan informasi kepegawaian, BKPSDMD dapat menghindari kesalahan atau ketidakakuratan yang dapat berdampak negatif pada SIMPEG tersebut. Secara keseluruhan, kelengkapan dalam proses mutasi ASN merupakan faktor penting untuk memastikan proses mutasi yang adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bramantya Mahardika Angga Arista. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar*, skripsi 2010
- Davis, Gordon B, (2002). *Kerangka Dasar: Sistem Informasi Manajemen, Bagian I Pengantar. Seri Manajemen No. 90-A. Cetakan Kedua Belas*, Jakarta: PT. Pustaka Binawan Pressindo,
- Effendi, U. (2019). *Asas Manajemen*. Depok:PT.RajaGrafindo Persada
- Hasibuan. 2016. *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Hariyanto, Bambang. (2004). *Sistem Manajemen Basis Data : Pemodelan, Perancangan, dan Terapannya*. Bandung : Informatika.
- Hasmin., Jumiaty Nurung. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Solok: Mitra Cendekia Media.
- H. A. S. Moenir. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT.Bumi aksara.

- Moekijat. (2010). *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung:CV. Remadja Karya
- Musanef. (2012). *Manajemen Kepegawaian Indonesia. Jilid II*, Jakarta: PT Gunung Agung.
- Nugroho, Eko. (2011). *Sistem Informasi Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Perkembangan*. Yogyakarta: Andi.
- Toding, A. R., Niswaty, R., & Akib, H. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pada Kantor Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan Di Kota Makassar. *Jurnal Office, 1*(1), 71–79.
- Rifa'i, Bachtiar. (2013). Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rajo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan dan Manajemen Publik. 11*(1):132.
- Rochaety, Eti. (2011). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Siagian P. Sondang. (2010). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suryadi. (2011). *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Syahrudin, M. A. (2019). *Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Muhammadiyah Makassar.
- Toding, A. R., Niswaty, R., & Akib, H. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pada Kantor Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan Di Kota Makassar. *Jurnal Office, 1*(1), 71–79.
- Veithzal, Rivai. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Dari teori Ke Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers
- Winarno Wahyu Wing.(2017). *Sistem Informasi Manajemen*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Waluyo, (2007). *Manajemen Publik (konsep, aplikasi, Implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*. Bandung: Mandar Maju